

ANALISA PERAN GREENPEACE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL

Ave Anak Anugrah¹⁾, Fathir Nutthoriq²⁾, Ratu Aisyah Diva Maha³⁾, Zidni Alfian Rosadi⁴⁾, Jerry
Indrawan⁵⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Email
2210413034@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Isu lingkungan kini menjadi bagian penting dalam politik global, mendorong keterlibatan aktor non-negara seperti Greenpeace. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Greenpeace dalam memengaruhi kebijakan lingkungan internasional melalui kampanye transnasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah strategi Greenpeace dalam advokasi lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa Greenpeace mampu membentuk opini publik, menekan aktor negara, dan berkontribusi dalam pembentukan norma global melalui aksi langsung, kampanye digital, serta partisipasi dalam forum internasional. Meski menghadapi tantangan politik dan budaya, Greenpeace tetap berperan sebagai aktor penting dalam tata kelola lingkungan global.

Kata kunci: Greenpeace, diplomasi lingkungan, perubahan iklim.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam diskursus global. Masalah seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, hingga degradasi sumber daya alam kini menjadi tantangan yang sifatnya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara dan lintas generasi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak sistemik terhadap berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, politik, dan keamanan global. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) juga menegaskan pentingnya tindakan mitigasi yang cepat dan efektif sebelum tahun 2030 untuk mencegah

kerusakan lingkungan yang lebih parah (IPCC, 2021). Kesadaran akan kompleksitas serta keterkaitan masalah ini membuat banyak negara akhirnya memasukkan isu lingkungan ke dalam agenda kebijakan luar negeri mereka. Di era globalisasi saat ini, tantangan lingkungan tidak bisa lagi ditangani secara sepihak oleh masing-masing negara, melainkan membutuhkan kolaborasi multilateral dan keterlibatan berbagai aktor lintas sektor. Dengan kata lain, tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari politik global yang penuh negosiasi, kompromi, bahkan konflik kepentingan.

Seiring dengan meningkatnya urgensi masalah lingkungan, aktor-aktor non-negara

seperti organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional, komunitas lokal, hingga individu berpengaruh mulai memainkan peran yang semakin penting dalam diplomasi dan tata kelola lingkungan. Banyak pihak menilai bahwa negara-negara tidak cukup cepat atau efektif dalam menangani isu-isu lingkungan, sehingga tercipta ruang bagi aktor-aktor non-negara untuk berkontribusi, bahkan memimpin berbagai inisiatif. Secara khusus, NGO lingkungan berperan dalam memproduksi pengetahuan, memobilisasi opini publik, serta mempengaruhi perumusan kebijakan di tingkat internasional. Keterlibatan NGO dalam negosiasi lingkungan internasional membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pengamat, melainkan agen perubahan yang aktif. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan jaringan global yang luas, NGO mampu mengangkat isu-isu kritis ke panggung internasional, mempercepat adopsi standar baru, dan menjaga agar suara masyarakat sipil tetap terdengar dalam arena global.

Di antara banyak NGO lingkungan yang berkontribusi besar, Greenpeace menjadi salah satu yang paling dikenal dan berpengaruh di dunia. Sejak didirikan pada tahun 1971, Greenpeace mengadopsi pendekatan aksi langsung (direct action) serta kampanye berbasis bukti untuk menantang praktik industri dan kebijakan pemerintah yang dianggap merusak lingkungan. Melalui strategi kampanye yang inovatif dan sering kali dramatis, Greenpeace berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap

isu-isu besar seperti penangkapan ikan berlebihan, deforestasi, perubahan iklim, serta ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, Greenpeace juga mengandalkan metode “witnessing” dan “bearing witness” sebagai taktik moral untuk memperkuat pesan mereka (Doyle, 2011). Greenpeace tidak hanya fokus pada aksi protes, tetapi juga berkontribusi dalam menawarkan alternatif kebijakan yang berbasis riset ilmiah, menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi mitra kritis dalam berbagai forum negosiasi internasional. Karena keberaniannya dalam menghadapi negara dan perusahaan besar, Greenpeace telah menjadi simbol kekuatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan lingkungan di tingkat global.

Greenpeace membuktikan bahwa NGO mampu menjadi aktor penting dalam membentuk politik global melalui advokasi lingkungan. Dengan beroperasi di lebih dari 50 negara dan dengan pendanaan independen dari pemerintah atau korporasi, Greenpeace menjaga integritas kampanyenya. Organisasi ini juga aktif dalam konferensi internasional seperti Conference of Parties (COP) dan menginisiasi kampanye besar seperti “Save the Arctic” untuk menyoroti pentingnya aksi global dalam isu perubahan iklim. Sebagai organisasi transnasional, Greenpeace berkontribusi dalam membentuk jaringan politik global baru yang disebut “environmental world politics”, di mana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal. Lewat media sosial, lobi politik, litigasi strategis, dan kampanye publik, Greenpeace

berhasil membentuk opini global dan mendorong perubahan regulasi. Keberhasilan mereka dalam menghentikan proyek energi fosil serta memperjuangkan konservasi hutan tropis menjadi bukti nyata kapasitas NGO dalam mengubah kebijakan global. Dengan demikian, Greenpeace tidak hanya berperan sebagai aktor advokasi, melainkan juga penggerak penting dalam tatanan politik global berbasis keadilan lingkungan.

Dengan demikian, maka isu lingkungan hidup telah menjadi bagian integral dalam politik global, di mana aktor-aktor non-negara seperti NGO memainkan peran sentral. Greenpeace sebagai contoh nyata menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil mampu mendobrak dominasi negara dalam pengambilan keputusan global terkait lingkungan. Dengan pendekatan inovatif, jaringan global yang kuat, dan komitmen terhadap independensi, Greenpeace mampu memengaruhi opini publik, mendorong perubahan regulasi, dan mempercepat adopsi standar baru dalam tata kelola lingkungan internasional. Di masa depan, keberadaan dan peran aktif NGO dalam diplomasi lingkungan diperkirakan akan semakin vital, mengingat kompleksitas tantangan ekologis yang membutuhkan respons kolektif lintas aktor dan batas negara.

LANDASAN TEORITIS

Teori Gerakan Sosial Baru

Teori gerakan sosial baru (new social movement theory) menekankan bahwa gerakan sosial kontemporer tidak hanya memfokuskan diri pada isu ekonomi atau kelas, tetapi juga pada nilai-nilai kultural seperti lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Greenpeace merupakan contoh gerakan yang lahir dari nilai-nilai baru tersebut, dengan misi memperjuangkan keberlanjutan ekologi dan keadilan intergenerasional. Gerakan ini menolak pendekatan kekerasan dan lebih memilih strategi komunikasi simbolik, media engagement, dan partisipasi publik untuk mencapai tujuannya (Rahman, 2023).

Gerakan sosial baru menekankan pembentukan identitas kolektif dan perubahan budaya, berbeda dari gerakan tradisional yang berpusat pada konflik kelas (Touraine, 2007). Gerakan seperti Greenpeace berhasil menciptakan solidaritas global melalui isu-isu universal seperti perlindungan lingkungan, yang menarik perhatian masyarakat lintas negara (Melucci, 2009). Strategi yang diadopsi Greenpeace seperti aksi langsung non-kekerasan (non-violent direct action), pemanfaatan media sosial, hingga kampanye viral menjadi senjata utama dalam menjangkau audiens global dan membentuk opini publik. Dalam kasus

kampanye “Save The Arctic” misalnya, Greenpeace memanfaatkan dukungan selebritas dan media digital untuk menciptakan narasi global yang kuat terhadap ancaman eksplorasi minyak di wilayah kutub. Gerakan ini mampu menggerakkan masyarakat dari berbagai negara untuk menekan perusahaan dan pemerintah yang terlibat (Wardani, 2021; Anshari, 2021).

Gerakan sosial baru memiliki struktur inklusif dan non-hierarkis, seperti terlihat pada pendekatan Greenpeace yang menggabungkan isu lokal, seperti pencemaran sungai di Indonesia, dengan kampanye internasional melalui jaringan globalnya (Della Porta & Diani, 2015). Gerakan ini juga menggunakan strategi komunikasi inovatif, seperti kampanye viral, untuk memperkuat dampak advokasinya (Buechler, 2011). Greenpeace mencerminkan dinamika gerakan sosial baru yang menggabungkan aspek lokal dan global secara simultan. Isu lokal seperti pencemaran sungai di Indonesia diangkat menjadi kampanye internasional dengan dukungan dari cabang Greenpeace di negara lain. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi ini bekerja dalam logika gerakan sosial baru: inklusif, non-hierarkis, dan berbasis nilai moral serta kesadaran kolektif terhadap lingkungan.

Dengan demikian, teori ini sangat relevan dalam memahami bagaimana strategi dan nilai Greenpeace membentuk pola advokasi lingkungan di era global (Firdaus, 2023; Yulianti, 2020).

Teori Pemikiran Hijau (Green Theory)

Menurut Robyn Eckersley (2017), Green Theory adalah kerangka teoretis dalam hubungan internasional dan teori politik yang menempatkan isu lingkungan sebagai inti analisis, menantang pendekatan antroposentris yang mendominasi teori politik tradisional seperti neorealisme atau neoliberalisme. Eckersley menjelaskan bahwa Green Theory mendorong pendekatan ekosentris, yang mengakui nilai intrinsik alam, bukan hanya sebagai sumber daya untuk manusia. Teori ini menuntut restrukturisasi sistem politik dan ekonomi global untuk mengatasi krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, dengan mengutamakan keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Eckersley menekankan konsep “negara hijau” (*green state*), di mana kebijakan negara harus mencerminkan etika lingkungan dan melibatkan warga melalui “kewargaan hijau” (*green citizenship*), yang mendorong tanggung jawab individu untuk hidup secara berkelanjutan.

Peter Christoff dan Robyn Eckersley (2015) menambahkan bahwa Green Theory menantang model Westphalia yang berfokus pada kedaulatan negara, karena masalah lingkungan seperti polusi udara atau kehilangan biodiversitas bersifat

transnasional dan memerlukan kerjasama global. Mereka berpendapat bahwa teori ini menekankan pentingnya keadilan lingkungan global, terutama untuk melindungi komunitas rentan seperti masyarakat adat atau negara berkembang yang paling terdampak krisis iklim. Dalam konteks ini, Green Theory mendorong pendekatan seperti *degrowth* (pengurangan produksi dan konsumsi) untuk mengurangi tekanan pada ekosistem, sekaligus mengkritik kapitalisme yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

Simon Dalby (2020) menyoroti bahwa *Green Theory* juga berfokus pada keamanan lingkungan (*environmental security*), yang melihat krisis lingkungan sebagai ancaman terhadap stabilitas global, setara dengan konflik militer. Dalby berpendapat bahwa teori ini mendorong paradigma baru dalam hubungan internasional, di mana aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal memiliki peran besar dalam menciptakan solusi lingkungan. Ia mencontohkan bagaimana gerakan adat di berbagai negara telah menggunakan pengetahuan lokal untuk melindungi hutan dan sumber air, yang sejalan dengan prinsip ekosentris *Green Theory*. Sementara itu, Ramachandra Guha (2018) menekankan perspektif global selatan, menyatakan bahwa *Green Theory* harus mengintegrasikan pengetahuan dan praktik masyarakat adat yang telah hidup selaras dengan alam, serta mengkritik solusi lingkungan Barat yang sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal di negara berkembang.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam *Green Theory* yang menjadi landasan penerapannya dalam politik global. Prinsip utama adalah ekosentrisme, yang menempatkan alam sebagai pusat nilai moral, bukan hanya alat untuk kepentingan manusia. Selain itu, keadilan lingkungan menjadi prinsip penting, yang menuntut distribusi dampak lingkungan yang adil, terutama untuk kelompok marginal. Prinsip keberlanjutan juga krusial, menekankan perlunya menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang, sering kali melalui pendekatan seperti *degrowth* atau ekonomi sirkular. *Green Theory* juga mengedepankan kolaborasi lintas batas, mengakui bahwa masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, sebagaimana dijelaskan oleh Dalby (2020). Dalam praktiknya, teori ini menginspirasi gerakan seperti komunitas *ekovillage* atau kebijakan energi terbarukan, yang bertujuan menciptakan harmoni antara manusia dan alam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Sedangkan definisi Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sugiyono (2018) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi, digunakan untuk penelitian dalam kondisi ilmiah (eksperimental), dimana peneliti sebagai alat, teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif lebih menekankan pada penelitian. Penelitian kualitatif memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman makna dari data, dengan menggunakan pendekatan induktif dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman subjek. Sehingga Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kasus yang kompleks dan subjektif, melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Studi kepustakaan atau *Library research* sehingga Lokasi Penelitian ini akan dilakukan secara daring (*online*) dikarenakan data yang diperlukan berasal dari literatur terkait yang dapat diakses melalui berbagai sumber online seperti perpustakaan digital, jurnal online, dan publikasi pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, kondisi terkait dengan bagaimana peran dan strategi kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace sebagai *non-governmental organization* yang juga merupakan aktor transnasional dalam mempengaruhi berbagai kebijakan global terkait dengan lingkungan yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut dengan beberapa teori

terkait yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Greenpeace sebagai Aktor Transnasional dalam Mempengaruhi Pembentukan Norma dan Kebijakan Lingkungan di Tingkat Global

Isu lingkungan hidup semakin menjadi subjek diskusi global di era globalisasi saat ini. Berbagai pihak non-negara berusaha mempengaruhi kebijakan dan standar lingkungan global karena krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam hal ini, Greenpeace adalah salah satu organisasi internasional yang paling terkenal. Greenpeace, yang didirikan pada tahun 1971, telah berkembang menjadi organisasi lingkungan internasional dengan jaringan luas di berbagai negara. Organisasi ini sangat penting untuk mendorong kebijakan dan standar lingkungan di seluruh dunia dan di negara-negara mereka sendiri. Meskipun Greenpeace tidak terdaftar secara hukum internasional, organisasi ini memiliki kekuatan melalui strategi advokasi, kampanye publik, dan aksi langsung non-kekerasan. Mereka juga dapat mempengaruhi opini publik dan membuat tekanan moral terhadap aktor negara dan perusahaan besar. Sebagai organisasi multinasional, Greenpeace memainkan peran penting dalam menciptakan standar lingkungan

internasional. Greenpeace adalah organisasi non-pemerintah yang independen dan beroperasi lintas negara yang berupaya mendorong kebijakan ramah lingkungan dari pemerintah dan perusahaan melalui advokasi, kampanye publik, dan aksi langsung non-kekerasan. Kesuksesan Greenpeace terletak pada kemampuan mereka untuk menghubungkan masalah lokal dengan diskusi internasional, meletakkan tekanan moral dan politik yang dapat memengaruhi agenda global. Contohnya adalah kampanye anti-penebangan hutan di Papua dan Amazon, yang berhasil menarik perhatian masyarakat global dan mendorong organisasi multinasional untuk meninjau rantai pasokan mereka. Greenpeace tidak hanya berpartisipasi dalam perdebatan publik, tetapi juga aktif membentuk standar melalui partisipasinya dalam pertemuan global seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), dengan memberikan laporan alternatif, mengusulkan kebijakan, dan mendorong opini publik. Untuk meningkatkan kesadaran di seluruh dunia, Greenpeace menggunakan media dan teknologi informasi untuk menjadi aktor entrepreneur, yang berarti mereka mendorong norma baru (Finnemore & Sikkink, 1998). Greenpeace berfungsi untuk mendorong perubahan dengan menantang konvensi dan mendorong peraturan global tentang energi bersih, pelestarian keanekaragaman hayati, dan iklim.

Kemudian berbicara mengenai kiprah *Greenpeace* terkait dengan perannya dalam

pembentukan norma dan kebijakan lingkungan global dengan kerangka *Green theory* ; nyatanya organisasi yang memiliki fokus isu lingkungan internasional ini mampu merefleksikan nilai - nilai lingkungan yang sejalan dengan konsep dasar *Green theory* yang menolak logika pemikiran dengan fokus utama pertumbuhan ekonomi sebesar - besarnya sebagaimana realitas yang terjadi di berbagai negara maju dengan dominasi korporasi besar (dan tak jarang justru mendapat dukungan dari negara melalui kebijakan yang ada). Hal ini sejalan dengan pendapat Hayward (1998) dalam tulisannya yang berjudul *Political Theory and Ecological Values*, dimana menurutnya *Green theory* berfokus untuk mengkritisi lebih lanjut berbagai kebijakan negara yang dalam praktiknya cenderung menomorduakan nilai lingkungan. Lebih lanjut, tak bisa dipungkiri Greenpeace juga turut andil dalam proses pembuatan rekomendasi atau wacana baru yang berupaya mendorong transformasi struktural terkait dengan praktik dan sistem ekonomi - politik global sebagaimana yang dijelaskan oleh Carter (2018) dalam tulisannya yang berjudul *The Politics of the Environment : Ideas, Activism and Policy*, menjelaskan berbagai organisasi transnasional seperti *Greenpeace* berhasil menginternalisasi nilai lingkungan ke dalam berbagai kebijakan internasional yang umumnya dilakukan melalui berbagai aksi simbolik yang menjadi salah satu agendanya ; misalnya melalui penghadangan terhadap kapal

pemburu yang berhasil mempengaruhi *Paris Agreement*.

Eksistensi Greenpeace tidak hanya sebagai pressure group yang berperan sebagai representasi moral ekonomi dan politik internasional tetapi juga berkaitan dengan konsep keberlanjutan global. Wapner (1996) dalam tulisannya yang berjudul *Environmental Activism and World Civic Politics* menjelaskan bahwa sebagai aktor non - negara, Greenpeace memiliki kekuatan normatif yang cukup efektif dalam menekan berbagai kepentingan negara yang juga dibaluti oleh kepentingan negara. Namun tak bisa dipungkiri, dalam praktiknya tak sedikit kritik yang ditujukan pada Greenpeace sebagai salah satu organisasi transnasional ; dimana banyak kalangan (termasuk aktor negara) yang kontraproduktif bahkan cenderung menghambat dialog konstruktif yang menjadi agenda utama Greenpeace terkait dengan pembentukan norma lingkungan internasional. Doherty & Doyle (2014) dalam tulisannya yang berjudul *Environmentalism, Resistance and Solidarity : The Politics of Friends of the Earth International* menekankan pentingnya peran koalisi lintas aktor, negara, korporasi hingga masyarakat terkait dengan transformasi ekologis yang menjadi tujuan dan fokus bersama ini. Tak hanya itu mengacu pada referensi yang sama ; adanya perbedaan sistem pemerintahan di berbagai negara juga tak bisa dipungkiri dapat mempengaruhi bahkan menghambat proses kampanye dan berbagai upaya lainnya terutama terkait dengan

penyebaran akses informasi dan kebebasan pendapat dalam ruang partisipasi publik ; sebagai contoh di berbagai negara yang menganut sistem otoriter seperti Tiongkok dan Rusia, adanya represi langsung, pembatasan kegiatan hingga penangkapan terhadap aktivis Greenpeace juga nyatanya menghambat ruang gerak organisasi. Kemudian, adanya perbedaan budaya di masing - masing negara juga disinyalir mendorong terjadinya risiko cultural backlash ; mempengaruhi tingkat sensitivitas pesan kampanye (di negara A bisa saja pesan kampanye tertentu menjadi hal lumrah ; berbeda halnya di negara B dan sebagainya). Secara garis besar, tantangan - tantangan ini lah yang turut mewarnai perjuangan Greenpeace dalam menegakkan konsep yang sejalan dengan *Green theory* ; persoalan yang tidak hanya soal teknis dan moral tetapi juga terkait dengan strategi sosial, politik, ekonomi hingga budaya yang kompleks.

Pengaruh Kampanye Transnasional Greenpeace Terhadap Perilaku Negara-Negara Dalam Merespons Isu Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

Penelitian tentang pengaruh kampanye transnasional Greenpeace terhadap perilaku negara-negara dalam merespons isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki dampak yang signifikan, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda tergantung pada konteks lokal masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, Greenpeace berhasil mendorong perubahan

kebijakan energi yang cukup penting. Pada tahun 2018, kampanye mereka memengaruhi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan untuk mengumumkan penghentian pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru di jaringan Jawa-Bali, sebuah langkah yang menandai pergeseran menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, di Filipina, peran Greenpeace terlihat jelas dalam pengesahan Undang-Undang Energi Terbarukan pada tahun 2008, yang mendorong penggunaan energi angin dan matahari sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kampanye mereka juga mendukung larangan pembakaran sampah melalui Undang-Undang Udara Bersih 1999, yang semakin memperkuat komitmen negara tersebut terhadap isu lingkungan. Di Thailand, Greenpeace menunjukkan kekuatan kolaborasi dengan komunitas lokal, seperti yang terjadi di Tapsakae, di mana mereka bersama-sama berhasil menghentikan pembangunan PLTU berkapasitas 4.000 megawatt di Prachuab Khiri Khan pada tahun 2008. Keberhasilan ini menegaskan bahwa strategi gabungan antara organisasi internasional dan kelompok lokal dapat menjadi kunci dalam mencapai hasil nyata.

Selain aksi langsung, Greenpeace juga memanfaatkan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu contohnya adalah kampanye #PantangPlastik yang dijalankan melalui platform media sosial seperti Instagram. Kampanye ini terbukti efektif dalam

membangun kesadaran publik tentang dampak buruk plastik terhadap lingkungan, meskipun perubahan perilaku masyarakat cenderung berlangsung secara bertahap dan tidak instan. Namun, keberhasilan Greenpeace tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti kepentingan ekonomi yang kuat dan resistensi politik sering kali menjadi hambatan, terutama di negara-negara yang bergantung pada industri ekstraktif. Di Indonesia, misalnya, dominasi oligarki dan struktur kekuasaan yang sudah mapan kerap mempersulit implementasi kebijakan lingkungan yang lebih progresif, bahkan menghambat munculnya partai politik berbasis lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kampanye Greenpeace memiliki dampak, ada batasan yang dipengaruhi oleh dinamika lokal.

Temuan ini sejalan dengan teori gerakan sosial baru, yang menyoroti peran identitas kolektif dan nilai-nilai budaya dalam mendorong perubahan sosial. Greenpeace membangun narasi "bumi yang rapuh" untuk menciptakan kesadaran kolektif lintas negara tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Strategi mereka, yang mencakup aksi langsung di lapangan dan kampanye digital yang masif, memanfaatkan simbolisme dan komunikasi modern untuk memengaruhi opini publik serta pengambil kebijakan. Penelitian ini juga didukung oleh pandangan Van der Heijden (2002), yang menegaskan bahwa organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace memainkan peran penting dalam politik lingkungan global, tetapi keberhasilannya

sangat bergantung pada faktor lokal seperti tingkat keterbukaan politik dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai dampak yang lebih besar, Greenpeace perlu mengintegrasikan strategi global mereka dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, sekaligus memperkuat

kolaborasi dengan komunitas setempat. Keberhasilan di Thailand dan Filipina menjadi bukti bahwa pendekatan ini dapat mengatasi hambatan politik dan ekonomi yang ada, sehingga memperluas pengaruh kampanye transnasional mereka dalam menangani isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan

SIMPULAN

Greenpeace membuktikan dirinya sebagai aktor transnasional yang berpengaruh dalam pembentukan norma dan kebijakan lingkungan di tingkat global. Melalui strategi aksi langsung, kampanye publik, advokasi, serta keterlibatan dalam forum internasional, Greenpeace berhasil menekan aktor negara dan korporasi, serta membentuk opini publik dalam mendorong kebijakan ramah lingkungan. Pendekatan mereka yang sejalan dengan *green theory* menolak dominasi pertumbuhan ekonomi semata dan menekankan pentingnya keadilan ekologis. Pengaruh Greenpeace terbukti nyata di berbagai negara seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand, di mana kampanye mereka mampu mendorong perubahan kebijakan signifikan. Namun, efektivitas kampanye tersebut tetap dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, integrasi antara strategi global dengan pendekatan lokal serta kolaborasi lintas aktor menjadi kunci untuk memperluas dampak gerakan lingkungan transnasional ini dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, R. (2021). Aktivisme Greenpeace dalam Politik Lingkungan Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1), 24–36. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/4063/3573>.
- Betsill, M. M., & Corell, E. (2015). *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. MIT Press.
- Buechler, S. M. (2016). *Understanding social movements: Theories from the classical era to the present*. Routledge.
- Carter, N. (2018). *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge University Press.
- Christoff, P., & Eckersley, R. (2015). *Globalization and the Environment*. Rowman & Littlefield.
- Dalby, S. (2020). *Anthropocene geopolitics: Globalization, security, sustainability*. University of Ottawa Press.
- Dobson, A. (2007). *Green political thought*. Routledge.

- Doherty, B., & Doyle, T. (2014). *Environmentalism, Resistance and Solidarity: The Politics of Friends of the Earth International*. Palgrave Macmillan.
- Doyle, T. (2011). *Environmental Movements in Majority and Minority Worlds: A Global Perspective*. Rutgers University Press.
- Doyle, T. (2018). *Environmental Movements in Majority World Nations: A Global Perspective*. Rutgers University Press.
- Eckersley, R. (2017). Green Political Theory: Nature, Virtue, and Progress. In T. Gabrielson et al. (Eds.), *The Oxford Handbook of Environmental Political Theory*. Oxford University Press.
- Fakhrian, L. R. (2024). GREENPEACE: SEBUAH GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK HIJAU DI INDONESIA (KAMPANYE GREENPEACE DI JAKARTA 2006-2021) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Firdaus, M. (2023). Greenpeace sebagai Gerakan Sosial Baru: Analisis Peran dalam Kampanye Global. *IJPS Studies*, 5(2), 45-59. <https://ijps.unram.ac.id/index.php/ijps/article/download/130/60>.
- Gulbrandsen, L. H., & Neumann, I. B. (2021). NGO diplomacy in the Arctic: The Cases of Greenpeace and the Inuit Circumpolar Council. *Global Environmental Politics*, 21(2), 1-23.
- Hayward, T. (1998). *Political Theory and Ecological Values*. Polity Press.
- IPCC. (2021). Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Melucci, A., Keane, J., & Mier, P. (1989). *Nomads of the present: Social movements and individual needs in contemporary society*. (No Title).
- Morgera, E. (2020). Environmental human rights: Mapping the terrain. *Journal of Human Rights and the Environment*, 11(2), 177-199.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nasiritousi, N. (2017). Shaping the effectiveness of global climate governance: A review of major assessment studies. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(6), e453.
- Nuraini, A. (2022). Advokasi Greenpeace terhadap Perlindungan Hutan di Indonesia. *Dauliyah: Journal of International Relations*, 4(1), 60-78. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/431/392>.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group

Parameswari, P. (2016). Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 1(2), 209-225.

Rahman, A. (2023). Politik Hijau dan Peran Greenpeace dalam Diplomasi Lingkungan. *Jurnal Al-Tamaddun*, 11(2), 78–92. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/40536/17984>.

Sari, D. (2021). Pengaruh Aktor Transnasional dalam Politik Lingkungan di Asia Tenggara. Repository UPNJatim. <https://repository.upnjatim.ac.id/6197/1/17044010039.-cover.pdf>.

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Touraine, A. (2007). *New paradigm for understanding Today's world. Polity*.

Wahyudin, E. A. (2018). Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi Walhi Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta 2004-2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Wardani, N. (2021). Greenpeace dan Mobilisasi Global: Studi Kasus Kampanye Save The Arctic. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa HI Unpas*. <http://repository.unpas.ac.id/72282/3/Bab%202.pdf>.

Wapner, P. (1996). *Environmental Activism and World Civic Politics*. State University of New York Press.

Yulianti, T. (2020). Kekuatan Jaringan Transnasional Greenpeace dalam Advokasi Isu Deforestasi. Repository UNPAS. <http://repository.unpas.ac.id/69713/>.